

**TESIS**

**IMPLIKASI YURIDIS PELAKSANAAN RAPAT UMUM  
PEMEGANG SAHAM DI LUAR TEMPAT KEDUDUKAN  
PERSEROAN**



Diajukan oleh

**HADAA'IQO ZANNATA BULQISH PUTRI UMBARA**

**NIM.2320216320068**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**BANJARMASIN**

**Juli 2025**

**IMPLIKASI YURIDIS PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DI  
LUAR TEMPAT KEDUDUKAN PERSEROAN**

**TESIS**

**Untuk memperoleh gelar Magister  
Dalam Program Magister Ilmu Kenotariatan  
Pada Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat**

**Diajukan oleh**

**HADAA'IQO ZANNATA BULQISH PUTRI UMBARA**

**NIM. 2320216320068**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**FAKULTAS HUKUM**

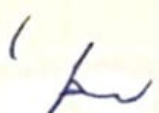
**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN**

**BANJARMASIN**

**Juli 2025**

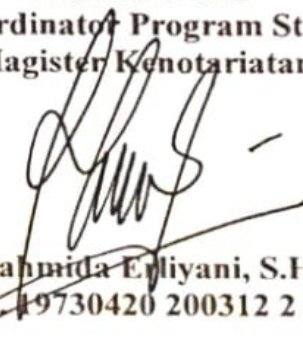
Tesis ini  
Telah diperiksa dan Disetujui  
pada Tanggal .....

**PEMBIMBING**



**Dr.H.Rachmadi Usman, S.H.,M.H.**  
**NIP. 19670914 199303 1 003**


**Diketahui oleh**  
**Koordinator Program Studi**  
**Magister Kenotariatan**



**Dr.Hj.Rahmida Eriyani, S.H., M.H.**  
**NIP. 19730420 200312 2 002**

**Diketahui oleh**  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Lambung Mangkurat**



  
**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
**NIP. 19750615 200312 1 001**

Tesis ini telah dipertahankan di depan

Sidang Panitia Penguji

Pada Tanggal 07 Juli 2025

Susunan panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr.Hj.Rahmida Erliyani, S.H., M.H.  
Sekretaris : Dr.Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.  
Anggota : Dr.H.Rachmadi Usman, S.H., M.H.

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hadaa'iqo Zannata Bulqish Putri Umbara  
NIM : 2320216320068  
Program Studi : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat  
Judul Tesis : IMPLIKASI YURIDIS PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DI LUAR TEMPAT KEDUDUKAN PERSEROAN

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut

Banjarmasin, 7 Juli 2025  
Yang membuat pernyataan,

Hadaa'iqo Zannata Bulqish Putri Umbara  
NIM. 2320216320068



# Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Diberikan kepada

**HADAA'IQO ZANNATA BULQISH PUTRI UMBARA**

**2320216320068**

*Telah dilakukan Pengecekan uji Kemiripan Tugas Akhir dengan indeks sebesar :*

**18 %**

Banjarmasin, 15 Juli 2025

Mengetahui,

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. Saprudin, S.H., LL.M.

NIP. 19820610 200501 1 002

Koordinator Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa  
Fakultas Hukum ULM

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 19830903 200912 1 002

**RINGKASAN**  
**IMPLIKASI YURIDIS PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DI**  
**LUAR TEMPAT KEDUDUKAN PERSEROAN**

oleh:

**Hadaa'iqo Zannata Bulqish Putri Umbara<sup>1</sup>, H. Rachmadi Usman<sup>2</sup>**

**Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat, 113 Halaman**

Penelitian ini membahas dinamika hukum pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam konteks perkembangan dunia usaha modern dan globalisasi. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja, menetapkan bahwa RUPS harus dilaksanakan di tempat kedudukan atau tempat usaha perseroan. Namun, praktik menunjukkan bahwa RUPS sering dilakukan di luar lokasi tersebut karena pertimbangan efisiensi, distribusi geografis pemegang saham, atau kemajuan teknologi. Selain itu, terdapat realitas bahwa tidak sedikit pemegang saham berdomisili di luar negeri. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan formal pelaksanaan RUPS di luar tempat kedudukan, serta bagaimana mekanisme hukum dapat menjamin keterlibatan dan perlindungan hak-hak pemegang saham lintas negara. Berdasarkan itu, penelitian ini merumuskan dua fokus utama: keabsahan pelaksanaan RUPS di luar kedudukan dan mekanisme hukum yang menjamin partisipasi pemegang saham luar negeri dalam proses korporasi.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, komparatif, serta pendekatan kasus. Sifatnya deskriptif-analitis dan preskriptif, dengan tujuan menjawab kekosongan norma dalam praktik pelaksanaan RUPS yang tidak sesuai lokasi formil. Bahan hukum meliputi UUPT, UU Cipta Kerja, literatur hukum korporasi, serta ketentuan teknis lainnya seperti POJK tentang e-RUPS. Keunikan penelitian ini terletak pada fokus terhadap Pasal 76 UUPT serta peran notaris dalam menjembatani kebutuhan hukum modern dengan kepatuhan terhadap prosedur hukum positif. Penelitian ini mengusulkan agar interpretasi terhadap Pasal 76 perlu mempertimbangkan asas kebebasan berkontrak, prinsip persetujuan seluruh pemegang saham, serta perlunya revisi sistematika pengaturan lokasi RUPS yang terlalu formalistik.

Pembahasan dalam Bab II menyoroti keabsahan pelaksanaan RUPS di luar tempat kedudukan perseroan. Berdasarkan Pasal 76 UUPT, pelaksanaan RUPS di tempat lain hanya dibenarkan apabila seluruh pemegang saham hadir atau menyetujui secara bulat, kecuali untuk agenda tertentu seperti perubahan anggaran dasar atau penggabungan usaha yang secara tegas harus dilaksanakan di tempat kedudukan. Analisis yuridis menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan tempat dapat berimplikasi terhadap pembatalan keputusan jika terdapat keberatan dari pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, penting untuk membedakan antara agenda yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan di luar kedudukan, serta memastikan

---

<sup>1</sup> NIM. 2320216320068

<sup>2</sup> Pembimbing Tesis

prosedur formil dan substansial terpenuhi. Kehadiran notaris sebagai pencatat jalannya rapat dan legalisasi keputusan juga menjadi penentu dalam menjaga keabsahan formil RUPS, khususnya dalam kondisi pelaksanaan yang tidak lazim.

Bab III mengkaji bagaimana hukum mengakomodasi pemegang saham yang berdomisili di luar negeri. Hak-hak mereka tetap melekat, termasuk hak menghadiri rapat, memberikan suara, memperoleh informasi, serta menyatakan pendapat. Mekanisme yang tersedia meliputi pemberian kuasa, RUPS secara elektronik (e-RUPS), dan RUPS sirkuler sebagaimana diatur Pasal 91 UUPT. Kendati secara normatif telah ada dasar hukum, tantangan praktik seperti otentikasi identitas, validitas dokumen asing, serta keterbatasan pengakuan hukum lintas negara tetap menjadi hambatan. Perlindungan hukum terhadap keputusan RUPS sangat bergantung pada prosedur, transparansi, dan dokumentasi yang sah. Oleh karena itu, perlu ada penguatan regulasi teknis, peran notaris sebagai penghubung, serta pemanfaatan teknologi yang mendukung prinsip kehati-hatian dan keterbukaan. Penelitian ini menyarankan agar pembuat kebijakan dan praktisi hukum mengembangkan sistem RUPS yang lebih fleksibel namun tetap memiliki legitimasi hukum yang kuat.

# **IMPLIKASI YURIDIS PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DI LUAR TEMPAT KEDUDUKAN PERSEROAN**

**oleh:**

**Hadaa'iqo Zannata Bulqish Putri Umbara<sup>3</sup>, H. Rachmadi Usman<sup>4</sup>**

**Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat, 113 Halaman**

## ***ABSTRAK***

Kata Kunci: Implikasi Yuridis, RUPS, Perseroan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di luar tempat kedudukan perseroan berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta mekanisme hukum yang dapat digunakan untuk mengakomodasi partisipasi pemegang saham yang berdomisili di luar negeri, khususnya dalam pelaksanaan agenda tertentu. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif-analitis dan tipe preskriptif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa RUPS dapat diselenggarakan di luar tempat kedudukan perseroan apabila memenuhi ketentuan dalam Pasal 76 ayat (3) UUPT, yaitu dihadiri seluruh pemegang saham dan keputusan disetujui secara bulat. Namun, untuk agenda tertentu seperti perubahan anggaran dasar atau pembubaran perseroan, Pasal 76 ayat (4) mewajibkan pelaksanaan RUPS dilakukan di tempat kedudukan perseroan. Keabsahan RUPS sangat bergantung pada jenis agenda dan pemenuhan syarat formil dan materil. Selain itu, mekanisme partisipasi pemegang saham luar negeri dapat dilakukan melalui pemberian kuasa, e-RUPS, atau RUPS sirkuler, namun tetap harus memenuhi standar autentikasi dan keabsahan tanda tangan elektronik. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi dan tata kelola perseroan untuk menjamin legitimasi keputusan RUPS dan perlindungan hukum bagi seluruh pemegang saham.

---

<sup>3</sup> NIM: 2320216320068

<sup>4</sup> Pembimbing Tesis

**JURIDICAL IMPLICATIONS OF HOLDING A GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS OUTSIDE DOMICILE OF THE COMPANY**

**by:**

**Hadaa'iqo Zannata Bulqish Putri Umbara<sup>5</sup>, H. Rachmadi Usman<sup>6</sup>  
Master of Notarial Law Lambung Mangkurat University, 113 pages**

***ABSTRACT***

Keywords: Legal Implications, GMS, Corporation.

This research aims to analyze the validity of convening the General Meeting of Shareholders (GMS) outside the domicile of the company pursuant to Article 76 of Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies, as well as to examine the legal mechanisms available to accommodate the participation of shareholders residing abroad, particularly in relation to special agenda items. This study is normative legal research with a descriptive-analytical nature and prescriptive type. The approaches used include statutory, conceptual, and comparative approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary sources, collected through library research.

The results show that the GMS may be held outside the company's domicile if it fulfills the requirements stipulated in Article 76 paragraph (3) of the Company Law, namely that all shareholders are present or represented and decisions are made unanimously. However, for specific agenda items such as amendments to the articles of association or company dissolution, Article 76 paragraph (4) mandates that the GMS must be held at the company's domicile. The legality of such GMS depends heavily on the type of agenda discussed and the fulfillment of formal and material requirements. Moreover, the participation of shareholders residing abroad may be facilitated through valid proxies, electronic GMS (e-GMS), or circular resolutions, provided that authentication and the validity of electronic signatures are ensured. Therefore, regulatory reform and good corporate governance are essential to ensure the legitimacy of GMS decisions and legal protection for all shareholders.

---

<sup>5</sup> Student Number: 2320216320068

<sup>6</sup> Supervisor

## UCAPAN TERIMAKASIH

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan penulis kepada selesainya penyusunan tesis ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan tesis ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan.

Dalam kesempatan ini, izinkan penulis dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan tesis ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini penulis tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan dukungan dan fasilitas selama penulis menempuh Pendidikan di Program Studi Magister Kenotariatan. Terima kasih atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan, serta atas segala kebijakan dan arahan yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan studi ini. Semoga segala kebaikan Bapak mendapat balasan dari Allah S.W.T.;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.** selaku Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan tesis ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan tesis;

5. **Tim Penguji dalam sidang tesis** Penulis, yang perannya tidak kalah penting telah memberikan masukan dan saran keilmuan serta pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian tesis ini;

6. Yang terhormat lagi terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen maupun Praktisi Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum kenotariatan. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;

7. Yang tercinta dan tersayang Ayah dari penulis **Alm. Bagus Umbara, S.E.**, penulis berterimakasih telah menjadi sosok Ayah yang luar biasa yang menjadi panutan penulis. Terima kasih atas segala jasa yang Ayahnda berikan kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini;

8. Yang tercinta dan tersayang Ibu dari penulis **Nur Rasidah**, Penulis ucapkan terima kasih karena menjadi sosok Ibu yang senantiasa berjuang dan meminjamkan bahu ketika penulis merasa lelah, ketahuilah engkau merupakan sosok terkuat yang penulis kenal semasa hidup penulis. Terima kasih atas semua dukungan serta doa yang Ibunda berikan kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini;

9. Yang tercinta dan tersayang adik-adik dari penulis **Jannata Al'liya Shawaba Putri Umbara, Muhammad Ibrahim Ramadhan Putra Umbara, Muhammad Uqhashah Umbara, dan Muhammad Uwaish Umbara**, Penulis ucapkan terima kasih karena penulis termotivasi untuk menjadi sosok yang independen dan tidak gampang untuk menyerah;

10. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Kakak **Astuti, S.Pd.**, Kakak **Rahmah, S.Pd.**, dan Kakak **Chintia Dewi Kartika, S.E.** karena telah memberikan dukungan moral dalam proses perkuliahan dan penyelesaian tesis ini;

11. Kepada teman-teman Penulis **Suci Indah Sari, S.Pd., Muhammad Rizky Maulana, Agresea Christiani, S.H., Nabella, S.H., Siti Maysarah A.Md.AB., Ersa Nur Halimah, S.H., M.H., Rada Alfathania Hamdan, S.H., M.Kn., Nanda Rizky Amalia, S.H., M.Kn.**, serta **TO BRUTALITY FAMILY** dan yang lain tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih telah menjadi teman luar biasa yang menemani penulis dari perkuliahan sampai dengan tesis ini selesai ditulis, terima kasih atas segala dukungan dan bantuan yang kalian berikan;

12. Yang terhormat lagi kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan tesis ini selesai tepat pada waktunya.

Penulis menyadari, bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan tesis, agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Studi Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap tesis ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum kenotariatan serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 7 Juli 2025

**Hormat Penulis**

**Hadaa'iqo Zannata Bulqish Putri Umbara,  
S.H.**

**NIM. 2320216320068**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL DALAM.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN TESIS.....	v
RINGKASAN.....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	14
BAB II: RAPAT UMUM YANG DISELENGGARAKAN DI LUAR KEDUDUKAN PERSEROAN.....	16
A. Pengertian dan Kedudukan Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas.....	16
B. Ketentuan Hukum Mengenai Tempat Pelaksanaan RUPS.....	27

C. Analisis Yuridis terhadap Keabsahan RUPS yang Dilaksanakan di Luar Kedudukan Perseroan.....	29
D. Restriksi Hukum terhadap Agenda Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham.....	53
<b>BAB III: MEKANISME HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN RUPS KETIKA TERDAPAT PEMEGANG SAHAM YANG BERADA DI LUAR NEGERI</b> .....	64
A. Hak dan kewenangan Pemegang Saham dalam RUPS.....	64
B. Mekanisme Partisipasi Pemegang Saham yang Berdomisili di Luar Negeri.....	79
C. Aspek Perlindungan Hukum dan Validitas Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.....	88
D. Tantangan Yuridis Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik untuk Agenda Tertentu.....	102
<b>BAB IV: PENUTUP</b> .....	110
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran.....	111
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	113